

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak banyak diajukan oleh wajib pajak guna untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi tersebut. Banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan berdampak pada wajib pajak untuk memahami proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai ketentuan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Nama dan Tahun	Villy Vincentia Sorongan (2015)
Judul Penelitian	Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada Kantor DJP Suluttenggo Malut
Hasil Penelitian	Hasil Penelitian bahwa dalam proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (UU KUP Pasal 36 ayat 1 huruf a,b,c) selama Tahun 2014, Kantor Wilayah DJP

	<p>Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.</p>
--	--

Nama dan Tahun	Dela Nungki Suras (2017)
Judul Penelitian	Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)
Hasil Penelitian	<p>Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga telah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi adalah pelimpahan kewenangan atributif atas perintah undang-undang atas dasar pengenaan sanksi administrasi Berupa</p>

	<p>Bunga pada Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Namun, untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.</p>
--	--

Nama dan Tahun	F.C Susila Adiyanta (2018)
Judul Penelitian	Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagai kebijakan pemerintah dibidang perpajakan merupakan bentuk realisasi kewenangan yang diberikan oleh Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

	<p>Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) serta Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Sanksi Administrasi sebagai peraturan pelaksanaannya.</p>
--	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut *Munawir (1995, hal 3)*, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang kontribusi wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang bersifat memaksa. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembangunan nasional.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun, pajak juga memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.

1) Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga yang memerlukan keuangan untuk membiayai segala kebutuhannya. Bagi suatu negara, pajak merupakan sumber keuangan utama dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya.

2) Fungsi Mengatur *Non Budgetair*

Disamping sebagai sumber keuangan negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hal mengatur susunan pendapatan dan

kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan:

- a) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial
- b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur:

- a) Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri
- b) Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
- c) Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah

c. Jenis-jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa

keuntungan usaha, gaji, honorarium, uang pensiun, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak. Penghasilan berupa gaji, upah, honorium, uang pensiun, tunjangan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

a. Objek PPh Pasal 21

1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- a) Penghasilan yang diperoleh atau diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b) Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan yang sejenis.
- c) Penghasilan yang berhubungan dengan pemutusan kerja dan berhubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua dan penghasilan lain yang sejenis.
- d) Penghasilan tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan maupun upah yang dibayarkan bulanan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, berupa komisi, honorarium, fee dan imbalan lain yang sejenis yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun, dan imbalan lain yang sejenis.

2) Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan Pemerintah merupakan penerimaan.
- c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, seperti iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- d) Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah yang tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan, usaha, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

e) Beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan

dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka dari itu, tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000,-. Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut.

- a) Rp 54.000.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang telah kawin.
- c) Rp 54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersendiri digabung dengan penghasilan suami.
- d) Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung, keluarga dalam garis keturunan, dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

c. Tarif Progresif Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, perhitungan tarif pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- 1) Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- 2) Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
- 3) Penghasilan Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
- 4) Penghasilan lebih dari Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

3. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

a. Bunga 2% per Bulan

Sanksi administrasi berupa bunga dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.

1) Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian, bunga pembayaran dibayar dengan menggunakan SSP, meliputi:

- a) Bunga karena pembetulan SPT
- b) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
- c) Bunga karena terlambat membayar
- d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan ditagih dengan STP sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

3) Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan ditagih dengan SKPKB sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

b. Denda Administrasi

Berikut ini adalah besarnya denda yang diberikan kepada

Wajib Pajak sesuai dengan masalah dan jenis pajaknya:

No	Masalah	Besarnya Denda
1	Tidak/terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT	<ul style="list-style-type: none"> - Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN - Rp 100.000,00 untuk SPT Masa - Rp 1.000.000,00 untuk SPT Masa Tahunan Badan - Rp 100.000,00 untuk SPT Masa Tahunan Orang Pribadi
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik	Ditambah 150%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usahanya b. Tidak membuat atau mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP	Ditambah 2% denda dari dasar pengenaan pajak (DPP)

	yang tidak dikukuhkan)	
	<p>Khusus PBB:</p> <p>a. SPT,SKPKB tidak atau kurang atau terlambat dibayar</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar</p>	<p>(Maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak yang terutang</p>

Sumber: (Suandy, 2011)

c. Kenaikan 50% dan 100%

Besarnya kenaikan yang dikenakan kepada Wajib Pajak ditentukan pada masalah dan jenis pajaknya, sebagai berikut:

No	Masalah	Besarnya Denda
1.	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan:</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT:</p> <p>1) SPT Tahunan (PPh 29)</p> <p>2) SPT Tahunan (PPh</p>	<p>- Ditambah kenaikan 50%</p> <p>- Ditambah kenaikan 100%</p>

	21, 23, 26, dan PPN)	
	<p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 28</p> <p>c. Tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 29</p>	<p>- 50% PPh Pasal 29;</p> <p>- 100% PPh Pasal 21, 23, 26; dan 50% PPN</p> <p>- 50% PPh Pasal 29;</p> <p>- 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN</p>
2.	Dikeluarkan SKPKBT, karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	100% untuk semua pajak
3.	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih	100% dari jumlah pajak

	lebih, menghitung tarif 0%, diberi restitusi pajak	
--	---	--

Sumber: (Suandy, 2011)

4. Dasar Hukum

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah diatur dalam beberapa dasar hukum antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 36 Ayat 1 Huruf a

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum Perpajakan (UU KUP) merupakan perubahan ketiga

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dimana Pasal 36 Ayat 1

Huruf a berisi :

- 1) Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- 2) Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

3) Direktorat Jenderal Pajak dalam memberi keputusan atas permohonan yang diajukan maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Jika melebihi batas waktu tersebut permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 sebagai berikut:

Pasal	Berisi
3 ayat (1)	<p>Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain.
3 ayat (2)	<p>Penyampaian surat permohonan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.</p>

3 ayat (3)	<p>Penyampaian surat permohonan dengan cara lain meliputi:</p> <p>a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau</p> <p>b. e-Filing.</p>
3 ayat (4)	<p>Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke Direktorat Jenderal Pajak.</p>
3 ayat (5)	<p>Penyampaian surat permohonan secara langsung diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk di Kantor Pelayanan Pajak</p>
3 ayat (6)	<p>Penyampaian surat permohonan dengan E-Filling diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.</p>
3 ayat (7)	<p>Bukti pengiriman surat merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan.</p>
3 ayat (8)	<p>Tanggal yang tercantum pada tanda bukti pengiriman surat permohonan merupakan tanggal surat permohonan diterima.</p>
4	<p>Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau</p>

	<p>dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sesuai ketentuan Pasal 13A UU KUP; b. Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP; atau c. Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP selain STP sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5 ayat (1)	Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak.
5 ayat (2)	Permohonan pengurangan atau penghapusan

	<p>sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tidak diajukan keberatan;b. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;d. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benare. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, tetapi dicabut oleh wajib pajak;f. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi;g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh wajib pajak; atau
--	---

	h. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.
5 ayat (3)	<p>Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak diajukan keberatan; b. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; d. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; e. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, tetapi dicabut oleh wajib pajak; f. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil

	<p>pemeriksaan atau verifikasi;</p> <p>g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh wajib pajak; atau</p> <p>h. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.</p>
5 ayat (4)	<p>Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam STP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau</p> <p>b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.</p>
5 ayat (5)	<p>Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan</p>

	<p>permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; atau</p> <p>b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.</p>
5 ayat (6)	<p>Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;</p> <p>b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;</p>

	<p>c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;</p> <p>d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan</p> <p>e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus</p>
5 ayat (7)	Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
5 ayat (8)	<p>Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.</p>
5 ayat (9)	Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua tetap diajukan

	terhadap surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak
5 ayat (10)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
6 ayat (1)	<p>Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menguji pemenuhan ketentuan sesuai Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (6), untuk permohonan yang pertama; atau b. menguji pemenuhan ketentuan sesuai Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 5 ayat (8), untuk permohonan yang kedua.
6 ayat (2)	Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah memenuhi ketentuan, permohonan tersebut ditindaklanjuti.
6 ayat (3)	Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat

	pengembalian permohonan.
6 ayat (4)	<p>Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali; atau b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan.
6 ayat (5)	<p>Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau b. Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 5 ayat (8), untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali
7 ayat (1)	Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi

	ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
7 ayat (2)	Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
7 ayat (3)	Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
7 ayat (4)	Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
7 ayat (5)	Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian

	atau seluruh permintaan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
7 ayat (6)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
7 ayat (7)	Surat keputusan berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
7 ayat (8)	Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
8 ayat (1)	Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 5 ayat (1) terkait dengan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a)

	<p>Undang-Undang KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan</p> <p>b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan Surat Pemberitahuan yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak.</p>
8 ayat (2)	<p>Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan diberikan pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.</p>
9 ayat (1)	<p>Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 5 ayat (1) terkait dengan sanksi administrasi yang berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 9 ayat</p>

	<p>(2b) Undang-Undang KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan</p> <p>b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang terutang atau kekurangan pembayaran pajak yang terutang yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak.</p>
9 ayat (2)	<p>Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan diberikan pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.</p>
10 ayat (1)	<p>Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 5 ayat (1) terkait dengan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang</p>

	<p>KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, perhitungan waktu sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dapat berasal dari perhitungan waktu yang tercantum dalam 1 (satu) atau beberapa Surat Tagihan Pajak untuk dasar penagihan pajak yang sama.</p>
10 ayat (2)	<p>Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
10 ayat (3)	<p>Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan diberikan pengurangan sanksi</p>

	administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
10 ayat (4)	Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan.
11	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sehingga sanksi administrasi menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, diberikan untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
12 ayat (1)	Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan.
12 ayat (2)	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan

	<p>dapat dilakukan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;b. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; danc. memenuhi kriteria yang dapat berupa:<ul style="list-style-type: none">1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak;2) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;3) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
--	--

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dalam mengatur tata cara permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dalam penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus menaati prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.